

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia merencanakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Bagian Keempat Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara pasal 7 nomor 1 dan dua menyatakan :1 Rencana Induk Ibu Kota Negara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, 2 Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.(Berkas DPR, 2022).

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. yang telah di setuju oleh DPR pada tanggal 18 Januari 2022 dan pada tanggal 15 Februari 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan UU pemindahan Ibu Kota Negara di pulau Kalimantan tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu kota Negara pada tahun 2024. (Rosalia, 2014). Dengan demikian Undang - Undang merupakan sarana yang menjadi keharusan untuk menjadi dasar dalam membuat suatu reguasi serta mengekspresikan bahwa peraturan yang di buat mencerminkan pandangan hidup serta tidak melanggar Idiologi dasar Negara pancasila sebagai dasar pedoman hidup berbangsa (Saputra & Laksana, 2020).

Isu pemindahan Ibu Kota Negara ini memang telah lama di bahas oleh beberapa pemimpin Indonesia diantaranya Ir. Soekarno tahun 1957. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini menimbulkan polemik di masyarakat ada yang *Pro dan Kontra* terhadap pemindahan Ibu Kota Negara yang di nilai terlalu terburu - buru mengingat pada saat di wacanakan wabah pandemi *Covid 19* melanda dunia hingga ke Indonesia mengakibatkan lesunya aktifitas beberapa sektor.

Pada 29 Agustus 2019 Pemerintah mengumumkan Ibu Kota baru yang terletak di pulau Kalimantan Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dimulai pembangunannya tahun 2019 hingga rampung pada tahun 2024. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta di Pulau Kalimantan di lakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu: kedua Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan Utara, bentuk kehidupan masyarakatnya yang Heterogen dan terbuka, serta di dukung dengan *topografi* wilayah dengan kekuatan tiga matra (Darat, Laut, dan Udara) sebagai bentuk keamanan wilayah Ibu Kota serta kondisi Jakarta yang sangat padat, minimnya cadangan sumber air dan gedung pencakar langit yang bersifat baku (Wati & Yuningsih, 2021).

Alasan lainnya mengapa Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa karena faktor ekonomi, kegiatan ekonomi dan bisnis yang saat ini hanya terpusat di pulau Jawa di Ibu Kota saat ini Jakarta mengakibatkan melambatnya pusat - pusat ekonomi di Luar Pulau Jawa di tambah lagi Kondisi di Jakarta saat ini dengan kemacetan yang sangat tinggi, dengan kepadatan penduduk 15.015 jiwa per kilometer persegi menjadikan Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia.

Pertimbangan lainnya yang menjadikan pertimbangan mengapa pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah Jakarta yang berada di daerah pantai yang rendah serta rentan akan berbagai penyakit menular seperti diare dan malaria (Suganda, 2007). Pemindahan Ibu kota Negara dilakukan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa hamper 75 % penduduk Indonesia yang tinggal di pulau Jawa (Ma'had Aly, 2019). Dari beberapa faktor pertimbangan pemindahan ibu kota Negara diatas terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota di antaranya pertimbangan Sosio - Ekonomi, pertimbangan politik dan pertimbangan fisik.

Pertimbangan Sosio Ekonomi sangat penting menjadi pertimbangan di harapkan mengurangi pemusatan ekonomi di wilayah Ibu Kota yang lama sehingga dapat mengembangkan kawasan ekonomi baru contohnya seperti *Rio de Jainero, Lagos, Dar es Salaam, Zomba dan Belize City* (Rukmana , 2010) . Diperkirakan biaya yang di butuhkan untuk pemindahan Ibu Kota Negara menghabiskan anggaran 446,04 Triliun bentuk pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan Ibu kota Negara Indonesia. Dari total RP 446 Triliun anggaran yang di butuhkan pemerintah akan menanggung 19,2% dan sisanya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN dan Sawasta hingga tahun 2024 pembiayaan Ibu Kota Negara akan ditingkatkan melalui *investasi* KPBU dan swasta (Silalahi, 2019).

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi wilayah Indonesia di bagian Timur yang hampir 72 persen dari total keseluruhan wilayah Indonesia hanya 20

persen saja yang berpenguni. Seperti Papua, memiliki angka kepadatan penduduk sembilan juta per kilo meter persegi. Berbeda dengan Ibu kota Jakarta yang memiliki angka kepadatan penduduk 15.015 per kilometer persegi angka ini yang menjadikan Jakarta saat ini menjadi tidak stabil (Hutasoit, 2018).

Beberapa kota besar di Jawa yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat besar seperti Jakarta tidak mampu untuk mengatasi arus urbanisasi di tengah-tengah masyarakat akibatnya menimbulkan kesenjangan dan degradasi sosial. Pada saat yang sama konsentrasi akibat pembangunan industri di Jawa yang berkembang pesat mengakibatkan penyusutan lahan - lahan pertanian di Jawa sebesar 27 juta hektar pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi ibu kota Negara Indonesia di Kalimantan timur yang hanya memiliki kepadatan penduduk tahun 2015 hanya berkisar 27 jiwa per kilometer persegi.(Hutasoit, 2018).

DKI JAKARTA	12.592	12.023	12.985	15.006	12.012	13.469	12.245	12.555
JAWA BARAT	1.015	1.074	1.100	1.109	1.280	1.146	1.082	1.108
JAWA TENGAH	952	977	987	976	972	939	997	995
DI YOGYAKARTA	995	993	1.007	1.029	1.574	1.064	1.096	1.107
JAWA TIMUR	725	735	756	759	781	764	790	794
BANTEN	838	996	1.038	1.047	1.006	1.066	1.045	1.065
BALI	545	573	596	592	625	629	639	645
NUSA TENGGARA BARAT	216	206	199	215	211	211	218	221
NUSA TENGGARA TIMUR	78	83	86	86	93	92	95	98
KALIMANTAN BARAT	27	29	27	29	34	34	33	33
KALIMANTAN TENGAH	12	13	12	14	13	13	13	13
KALIMANTAN SELATAN	77	75	75	75	85	77	87	89
KALIMANTAN UTARA	12	11	12	12	15	13	16	16
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	144	134	140	138	154	141	157	158
SULAWESI TENGAH	35	36	35	37	34	37	33	36
SULAWESI SELATAN	153	153	132	135	162	147	147	169
SULAWESI TENGGARA	48	51	49	53	53	51	51	56
SUMBAWA	11	11	11	11	11	11	11	11

Gambar 1.1 Kepadatan penduduk m2

Sumber : bps.com

Menurut (Hutasoit, 2018:116) Pemindahan ibu kota Negara Indonesia ini di wilayah Kalimantan Timur secara tidak langsung memberikan energi positif untuk memperkuat status Indonesia sebagai Negara maritim terbesar di dunia dan mendukung pengembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai model konsep *Green City* di harapkan ibu kota Negara baru ini dapat memberikan sebuah model kota yang lestari yang belum terwujud hingga saat ini seperti:

Penataan pusat Ibu kota Negara yang memiliki fungsi – fungsi pusat penelitian kawasan industri jasa, pemukiman, pusat penelitian, sistem transportasi serta sarana dan prasarana yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang ibu kota negara), Membuat sebuah konsep kota yang kuat dan dapat mengendalikan fasilitas ruang – ruang kota menjadi bermanfaat dan efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007), Mengembangkan sebuah sarana transportasi yang terintegrasi berdasarkan konsep TOD (*Transit Oriented Development*) Mengembangkan sebuah konsep *Multistrata* dan bebas *Eksklusivisme* agar dapat menciptakan sebuah kota terpadu untuk seluruh warganya, Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (*capacity building and institutional development*) pengelolaan Ibu kota NKRI.

Di kutip dari <https://ikn.go.id/> di akses 18 maret 2022 konsep pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang telah di sahkan oleh pemerintah memiliki konsep *Green City* dan Delapan prinsip ibu kota Negara Indonesia di sebagai berikut :

Prinsip Mendesain Sesuai Kondisi Alam mengedepankan kawasan hijau di area pusat pemerintah lebih dari 75 persen, penduduk dapat mengakses kawasan hijau terbuka dalam rentang waktu yang cukup singkat yaitu 10 menit, menerapkan konsep ramah lingkungan di setiap pembangunan bertingkat komersial, institusional dan hunian.

a. Bhinneka Tunggal Ika

Pembangunan kawasan publik menggunakan prinsip kearifan lokal, universal, dan desain inklusif, hanya dalam waktu 10 menit penduduk dapat menggunakan layanan sosial.



Gambar 1.2 Konsep pembangunan Ikn
Sumber : <https://ikn.go.id/>

b. Terhubung, Mudah di akses dan Aktif

Sekitar 80 persen mode transportasi utama masyarakat menggunakan kendaraan umum, <50 menit konektifitas perpindahan dari kawasan utama ke bandara startegis tahun 2030.

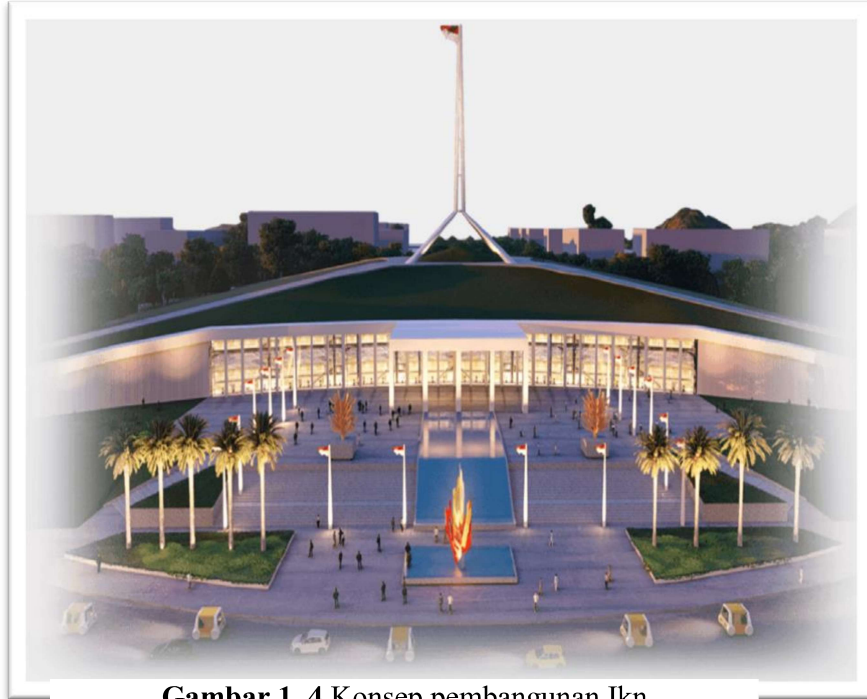


Gambar 1.3 Konsep pembangunan Ikn

Sumber : <https://ikn.go.id/>

c. Rendah Emisi Karbon

Mengedepankan sumber energi terbarukan, pada tahun 2045 menuju efesiensi pembangunan energi dalam bangunan sebesar 60 persen, 2045 menuju emisi karbon yang netral.



Gambar 1.4 Konsep pembangunan Ikn

Sumber : <https://ikn.go.id/>

d. Sirkuoler dan tangguh

Penyediaan sekitar 10 persen lahan produksi kebutuhan pangan di ibu kota negara Indonesia, tahun 2045 menuju daur ulang secara besar besaran 60 persen dari semua timbunan sampah.



Gambar 1.5 Konsep pembangunan Ikn

Sumber : <https://ikn.go.id/>

e. Aman dan terjangkau.

Pada tahun 2045 di targetkan akan masuk 10 kota terbaik menurut *Global Liveability Index*, seluruh pemukiman kawasan memiliki akses terhadap infrastruktur penting tahun 2045.



Gambar 1. 6 Konsep pembangunan Ikn

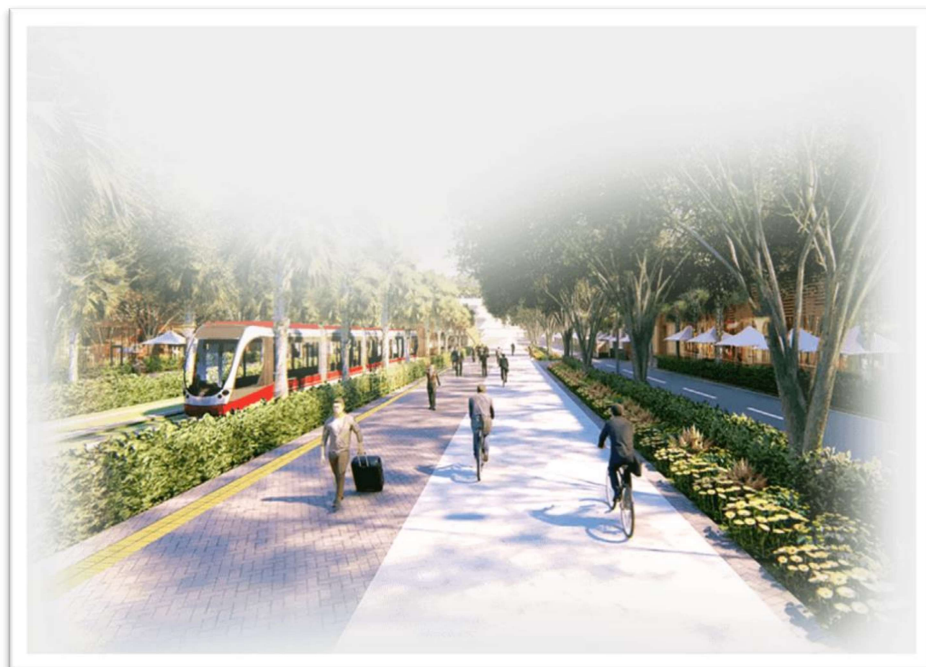
Sumber : <https://ikn.go.id/>

f. Kenyaman dan efisiensi melalui teknologi

Penggunaan sepenuhnya teknologi informasi untuk seluruh masyarakat dan sektor bisnis, peningkatan kepuasan bisnis melalui layanan digitalisasi sebesar 75 persen.



Gambar 1.7 Konsep pembangunan I kn
Sumber : <https://ikn.go.id/>



Gambar 1.8 Konsep pembangunan I kn
Sumber : <https://ikn.go.id/>



Gambar 1.9 Konsep pembangunan Ikn
Sumber : <https://ikn.go.id/>

g. Peluang ekonomi untuk semua

Menuju nol persen kemiskinan tahun 2035, meningkatkan pendapatan perkapita Negara, menekan rasio terendah tahun 2045 di Indonesia.



Gambar 1.10 Peluang ekonomi untuk semua
Sumber : <https://ikn.go.id/>, 2023



Gambar 1.11 Konsep pembangunan Ikn

Sumber : <https://ikn.go.id/>

Menurut (Choirul, 2019:29) ada enam faktor yang menjadi pertimbangan ibu kota Negara perlu di pindahkan yaitu : mengurangi beban kota Jakarta dan Jabodetabek Pesatnya arus Urbanisasi Jabodetabek yang terjadi membawa dampak yang sangat nyata bagi Ibu Kota pada saat itu terjadinya berbagai macam masalah akibat pesatnya arus Urbanisasi yang terjadi di antaranya masalah kemacetan akibat jumlah kendaraan yang meningkat pesat, fasilitas fasilitas yang tersedia tidak memadai, ditambah lagi banjir yang sering terjadi di Ibu Kota Jakarta.

Tujuan pemindahan Ibu kota Negara untuk mengubah pola pikir terhadap kecenderungan pembangunan dari *Jawasentris* ke Indonesia *Sentris*, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia Timur, merepresentasikan identitas bangsa. Pertimbangan dari politik seringkali menjadi pertimbangan utama dalam pemindahan ibu kota Negara. Hal ini disebabkan tujuan dari pemindahan Ibu kota

untuk membangun sebuah simbol yang merepresentasikan keberagaman, persatuan nasional serta keanekaragaman suku bangsa (Hoyle,1979).

Meningkatkan pengelolaan pemerintah yang efisien dan dan efektif. menerapkan konsep *smart, green and beautiful city* Ibu kota Negara akan bertindak sebagai syaraf bagi wilayah pemerintah pusat dan pusat Inovasi hijau, dan kota Samarinda menjadi jantung sebagai pusat peradaban sejarah dan sektor energi terbarukan sesuai dengan Visi Indonesia 2045 (ikn, 2022).

Rencana pemindahan ibu kota Negara tidak lepas dari pemberitaan media massa salah satu berita yang menyoroti pemindahan ibu kota Negara adalah majalah online tempo online yang berjudul berjudi pakai duit Sri.



Gambar 1.12 berita majalah tempo
Sumber : <https://majalah.online/tempo.co>

Berita yang di tulis media tempo setidaknya ada beberapa hal yang menajadi titik fokus pemberitaan. Diantaranya kementerian Umum dan perumahan rakyat

melelang proyek jalan tol bawah air pertama di Indonesia senilai 8,7 miliar sebagai “akses jalan utama dari kota Balikpapan”, Danis Sumadilaga ketua satuan tugas pelaksanaan pembangunan infrastruktur ibu kota Negara 11 februari 2022. Dalam berita yang di tulis di media Tempo kementrian PUPR mengumkan kebutuhan tahap awal pembangunan ibu kota Negara dalam rapat kerja dengan anggota DPR komisi V mengusulkan rencana belanja sebesar 46 Triliun kepada mentri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yang akan di gunakan untuk membangun infrastruktur seperti kantor Presiden dan Wakil Presiden, gedung Dewan perwakilan rakyat. Selain itu juga akan di bangun fasilitas umum seperti pembangunan fasilitas air minum jaringan listrik dan juga pembangunan jalan sebagai akses utama Ibu Kota.



Gambar 1. 13 Desain Istana Presiden
Sumber : <https://ikn.go.id/>



Gambar 1.14 Desain Gedung Dpr
Sumber : <https://ikn.go.id/>



Gambar 1.15 Bendungan Sepaku
Sumber : <https://ikn.go.id/>



Gambar 1.16 Bendungan Sepaku

Sumber : <https://ikn.go.id/>

Berita yang di tulis oleh majalah *Tempo* di atas memiliki wacana tertentu yang dintangkap oleh publik. Terkait dengan penjelasan di atas majalah *Tempo* melihat adanya sebuah masalah yang terkait penggunaan APBN Negara dalam membiayai pembangunan Ibu kota Negara sebesar 97 Triliun menggunakan dana APBN dari total keseluruhan pembangunan Ibu Kota Negara sebesar Rp. 446 Triliun.. Menurut Sri Mulyani anggaran yang di tetapkan menggunakan dana APBN Negara telah melalau beberapa kajian dan sesuai dengan kondisi Fiscal pasca – pamdemi covid – 19 dan akan berjanji menyesuaikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara menggunakan dana APBN seimbang dari tahun

2022 – sampai 2024. Dari total 97 triliun dana APBN yang di gunakan dalam tahap awal pembangunan Ibu kota Negara diharapkan dengan terbentuknya

Bentuk visualisasi grafis selanjutnya pada wacana ini ada pada kata “Tempo” dengan penambahan tanda huruf miring (Paragraf 16). Hal ini ditujukan agar pembaca dapat melihat penekanan bahwa Tempo yang dimaksud merujuk pada nama Media massa online yang berupa majalah yang meliput wawancara ataupun pemberitaan wacana diatas. Bentuk visualisasi grafis selanjutnya pada wacana ini ada pada kata “Intake” dengan penambahan tanda garis bawah (Paragraf 24). Hal ini ditujukan agar pembaca dapat melihat penekanan bahwa intake yang dimaksud merujuk pada nama proyek penyaluran air, dimana bendungan di gali lebih dalam dijadikan pemasok yang besar dan disalurkan kerumah- rumah yang akan diselesaikan pada tahun 2023 di Kalimantan utara. Penulis juga menggunakan ungkapan metafora pada wacana rubrik editorial dengan maksud menambah ornamen atau bumbu tulisannya. Penggunaan metafora terdapat pada kalimat “Bukan Istana negara atau kompleks parlemen” (paragraf 1). dimana menjelaskan bahwa itu adalah pemerintah, adanya Presiden, Menteri dan juga DPR

selanjutnya pada wacana ini ada pada kata “Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” dengan penambahan tanda garis bawah (Paragraf 2). Hal ini ditujukan agar pembaca dapat melihat penekanan bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud merujuk pada si Pelaku ataupun Eksekutor dalam pencarian dana untuk proyek Jalan Tol bahwa air.

fasilitas pendukung pembangunan seperti Jalan, gedung perkantoran dan tersedianya pasokan air yang memadai di ibu kota Negara. Agar dapat menarik minat *Investor* asing untuk menanamkan modal dalam pembangunan Ibu Kota Negara rencananya pemerintah akan mengundang putra mahkota Abu Dabi Mohammed Bin Zayed, Chief Exsecutive Officer Shoftbank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri inggris Tony Blair di harapkan dari pertemuan itu mengasikkan minat investor dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Diperlukan sebuah kajian analisis untuk melihat maslaah yang di beritakan oleh majalah *Online Tempo*. Wacana sendiri dalam kajian komunikasi dipandang sebagai sebuah unsur yang abstrak digunakan dalam struktur bahasa serta bagaimana aturan dari sebuah bahasa itu bekerja selain itu wacana juga dipandang sebagai sebuah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi (Badara, 2021:). Analisis wacana merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah wacana teks maupun lisan Seperti yang dirumuskan oleh Van Djik Analisis Wacana adalah salah satu cara untuk menemukan makna dari sebuah wacana. Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah analisis wacana van djik pemindahan ibu kota Negara indonesia di media *Online Tempo*.

Dalam Penggunaan metode analisis Vand Djik data yang di kumpulkan di olah dalam bentuk teks dan dokumentasi. Jenis penelitian teks dan dokumentasi merupakan unsur penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada cara mengartikan wacana yang ada dengan berdasarkan konteks nya. Untuk menarik kesimpulan berdasarkan observasi yang di amati melalui data.(sugiono, 2010). Menurut Lee

dan Poynton penelitian analisis wacana merupakan penelitian “ *post – positive rearsc methodoloies*” yang merupakan ciri khas dari sebuah pendekatan *feminisme* yang memberikan cukup warna pada pendekatan ini. Selain itu wacana yang di teliti berusaha untuk mengungkap *positioning* dan maksud dari sebuah wacana (Susilo, ida, 2010)

Analisis wacana menurut (Petrik, 2014:) merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan pada aspek pengetahuan tentang klausa, frase dan sebuah kalimat supaya komunikasi bisa berjalan secara baik. Penilaian bahwa Analisis Wacana sebagai salah satu cara untuk melihat struktur – struktur dalam teks memiliki sebuah kekuatan mewacanakan sebuah keyakinan di dalam sebuah teks (T. A. van Dijk, 1983:209). Untuk mengetahui Analisis wacana sebagai metode penelitian komunikasi, Badara mengatakan wacana tidak bisa untuk dipahami semata – mata dalam konteks *studi linguistik* melainkan harus di hubungkan dengan konteks yang di gunakan dalam menemukan konteks dalam komunikasi, siapa yang menjadi komunikatornya, melalui media apa, dan hubungan dari masing masing stekolder.(Badara, 2014).

Dari gambaran masalah di atas peneliti melihat malajah tempo memfokuskan untuk melihat penggunaan dana APBN untuk pembangunan awal Ibu Kota Negara dan melihat bahwa penggunaan dana untuk pembanguna Ibu Kota Negara di fokuskan kedalam hal – hal yang lebih penting seperti pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 kesehatan dan pengembangan mutu produk lokal agar dapat bersaing di pasar Indutri. Memilih judul penelitian yaitu

Analisis Wacana vand djik pemindahah ibu kota negara indonesia di media *Online Tempo* dengan judul berita Berjudi Pakai Duit Sri.

1.2. Fokus Penelitian

Agar hasil pengamatan ini bisa Terealisasikan maka akan lebih baik diperlukan batasan masalah agar menjadi tolak ukur penulis dalam meneliti dalam mengamati sebuah masalah berdasarkan Latar Belakang di atas. Batasan – batasan masalah yang menjadi titik fokus penelitian ini sebagai berikut : Untuk melihat bagaimana isi dari teks pemberitaan di *Tempo* tentang wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia menggunakan analisis Teun Van Djik.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana wacana yang muncul dari berita yang berjudul Berjudi Pakai Duit Sri di majalah *Online Tempo* ?

1.4. Tujuan Penulisan

untuk melihat wacana yang muncul dari berita yang berjudul Berjudi Pakai Duit Sri di majalah *Online Tempo*.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat memberi nilai tambah bagi sebuah pengetahuan ilmiah di bidang Ilmu Komunikasi khususnya bagaimana sebuah media mealukan suatu perubahan dengan persaingan Industri Digitalisasi pada saat ini Sehingga dapat bersaing di Industri hingga terciptanya Ideologi didalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini bagi penulis dapat menambah Ilmu pengetahuan di bidang Ilmu komunikasi serta dapat mengembangkan aspek dalam Ilmu komunikasi Untuk masa yang akan datang. Dan juga Menganalisis makna dari wacana yang di tulis oleh Majalah *Online Tempo* terkait dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

c. aspek sosialis

diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat melihat bahwa fungsi media dalam menyampaikan informasi sangat mempengaruhi realitas yang terjadi.